



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2008-2009  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : APJATI  
Sifat Rapat : **Terbuka**  
Hari, tanggal : Rabu, 28 Januari 2009  
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai  
Acara : Masukan tentang Permenakertrans Nomor 22/MEN/XII/2008  
Ketua Rapat : dr. Umar Wahid Hasjim, Sp.P/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Anggota : orang anggota dari 49 Anggota Komisi IX DPR RI, ijin.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Umum APJATI dibuka pukul 10.00 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 99 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Apjati mengharapkan agar keberangkatan TKI ke luar negeri dapat ditangani secara baik, karena mereka merupakan sumber devisa negara. Jumlah TKI yang mengalami musibah/kasus tidak signifikan dibandingkan dengan banyaknya TKI yang berhasil.
2. Apjati mengharapkan agar UU Nomor 39 tahun 2004 tersebut dapat diamandemen, selain itu agar diupayakan program TKI menjadi program nasional.
3. Apjati berpandangan bahwa keberadaan Permenakertrans Nomor 22/MEN/XII/2008 adalah sebuah langkah maju, karena telah memberdayakan unsur dinas tenaga kerja di kota/kabupaten dan provinsi. Kantor Dinas Tenaga Kerja menjadi satu-satunya tempat dalam mendaftarkan tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri, tidak seperti Perpres No. 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI dan Permenakertrans No.18/MEN/IX/2007, dimana penanganan TKI telah terjadi duplikasi antara Disnaker dengan BNP2TKI. Sebelum terbitnya Permenakertrans No. 22/MEN/XII/2008, telah terjadi duplikasi dalam penanganan keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, karena para TKI harus melalui 2 institusi yaitu Disnaker dan BNP2TKI.

4. Apjati mengharapkan agar peran calo dapat dikurangi dan penyelesaian TKI dapat dilaksanakan dengan mudah, murah, cepat dan aman.
5. Agar Komisi IX DPR RI dapat melakukan pengawasan terhadap implementasi Permenakertrans Nomor 22/MEN/XII/2008 dan melibatkan peran daerah sebagai fungsi kontrol.

### III. USUL/MASUKAN ANGGOTA KOMISI IX DPR RI

1. Agar Komisi IX DPR diberikan masukan/analisa secara tertulis terkait dengan segi negatif dan positif Permenakertrans No. 22/MEN/XII/2008 sehingga masukan tersebut dapat disampaikan kepada Menakertrans RI dalam Raker berikutnya.
2. Keberadaan BNP2TKI dan Apjati ternyata tidak dapat mengurangi permasalahan TKI, seharusnya keberadaan Apjati dapat mengurangi permasalahan di lingkungan TKI. Apjati harus dapat berperan aktif dalam menangani banyaknya PPTKIS yang numpang proses (sewa bendera).
3. Mengingat terjadinya dualisme dalam penanganan TKI, agar Komisi IX DPR RI dapat meluruskan peran BNP2TKI dan Depnakertrans.
4. Apjati jangan bangga dalam mentargetkan pengiriman TKI yang lebih besar, karena pengiriman TKI yang besar merupakan indikasi tidak berhasilnya sektor tenaga kerja, baik di tingkat lokal dan nasional.
5. Agar Apjati dapat memperkecil atau menghilangkan peran brooker atau calo. Apjati diharapkan lebih meningkatkan pengiriman TKI yang lebih trampil.

### IV. Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan DPP Apjati telah membuat rangkuman sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI meminta DPP Apjati untuk melengkapi seluruh keterangan dan masukan tentang Permenakertrans No. 22/MEN/XII/2008 yang diberikan dalam bentuk tertulis agar dapat dipelajari oleh Komisi IX DPR RI.
2. Apjati mempunyai harapan besar terhadap terbitnya Permenakertrans No. 22/MEN/XII/2008 agar dapat memberikan iklim yang lebih kondusif terhadap proses penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri.

**Rapat ditutup pukul 12.00 WIB**

Jakarta, 28 Januari 2009

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Wakil Ketua,



**Dr. UMAR WAHID HASJIM, Sp.P**